

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya (pasal.1 UU No.28 Tahun 2007). Nilai tunggakan pajak per 31 Desember 2014 mencapai Rp 67,7 triliun. Hal itu diketahui berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DJP terus berupaya untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut. Berbagai tindakan penagihan pajak telah dilakukan seperti melalui surat paksa, pemblokiran rekening, penyitaan harta, hingga penyanderaan penanggung pajak ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Bagi negara-negara yang ada didunia pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati prosentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lain. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun, dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai target 46,22%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan disektor lainnya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini

dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Edaran Jendral Pajak No. S-14/PJ.7/2003,2003).

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dengan adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) bahkan tidak sedikit yang melakukan penghindaran pajak. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak agar yang dibayarkan lebih sedikit. Selain itu adanya faktor biaya untuk menyuap fikus, kemungkinan terdeteksi dan sanksi yang diperoleh perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan pelanggaran (Suandy, 2008).

*Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability dan responsibility*, mengatrrur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Saputra, 2012). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Selain itu keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik juga dianggap perlu untuk membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dianggap mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan. Peran *Good*

*Corporate Governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak sangat diperlukan.

Dalam melakukan manajemen pajak perlu diawasi agar tindakan manajemen pajak yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan struktur organisasi suatu perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan harus disusun dengan baik. *Leverage* (struktur hutang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya, penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).

*Return on assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan (Darmawan, 2014). ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Rachmithasari, 2015).

Perusahaan manufaktur yang menjadi objek dari penelitian ini dikarenakan perusahaan tersebut sudah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik. Dan masuk dalam daftar 100 penunggak pajak yang ada di Indonesia. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui hubungan antara *good corporate governance*, *leverage* dan *return on assets* terhadap penghindaran pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh karakteristik *good corporate governance*, *leverage*, dan *return on assets* terhadap penghindaran pajak ?”

## **C. Batasan Masalah**

Perusahaan yang diteliti pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2014. Variable independen yaitu *Good Corporate Governance* (ydwyan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit), *leverage*, dan *return on asstes*.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian secara empiris ini ingin menguji apakah, *good corporate governance*, *leverage*, dan *return on assets* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan Manufaktur dan terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2013-2014, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik *good corporate governance*, *leverage* dan *return on assets* terhadap penghindaran pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Pemerintah.**

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberi pengawasan lebih dari pemerintah terhadap perusahaan yang terdapat indikasi penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga potensi dan penerimaan pajak bisa lebih optimal.

## 2. Bagi Pemegang Saham.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemegang saham tentang pentingnya pajak dan perlakuan pajak terhadap perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak terutama di Indonesia.

